

**PENDIDIKAN TRADISIONAL
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
DALAM PRAKTEK KEKERASAN ANAK**

ASHABUL FADHLI
Email: ashabul_fadhli@yahoo.co.id

STAIN BATUSANGKAR SUMATERA BARAT

Abstract

The Constitution of 1945 instructs that education essentially humanize human beings. Briefly, it means that education on one side should be a source of strength against any process of dehumanization without discriminative attitude that often threatens the education and future of children. On the other hand, the source of power that allows humans to develop the whole of nature and its potential as a moral and dignified creature; which in turn became the basis of the formation of a great noble nation.

Keywords: *Child, education, traditional, violence.*

A. PENDAHULUAN

Sejak pendidikan tidak lagi disepakati sebagai proses yang dilakukan secara fleksibel pada waktu luang dalam sejarahnya pendidikan juga telah kehilangan aspek pengetahuan holistik (etika dan moralitas) dan lebih berkepentingan pada sisi kognitif. Cara pandang yang ditawarkan di bangku pendidikan mulai terkesan parsial. Keadaan ini tentu saja menyebabkan kompleksnya persoalan kemanusiaan pada dunia pendidikan modern. Realitanya, di dalam dan di luar dunia pendidikan terjadi pengerdilan melalui nilai dan sistem yang dianut. Porosnya berjibaku pada penghancuran diri sendiri. Lambat-laun manusia mengalami regresi, atrofi, deskrimanasi atau terhalang untuk berkembang sebagai manusia dalam arti yang seutuhnya, terutama bagi perkembangan anak. Kekeliruan dalam membina dan mendidik anak, tidak sedikit yang bermuara pada lingkup kekerasan anak.

Dalam negara yang telah menjamin hak konstitusional anak pun, anak masih belum sepenuhnya terlepas dari ancaman yang belakangan familiar dengan sebutan kekerasan. Anak masih dilihat sebagai pihak rentan yang cenderung untuk menerima perlakuan fisik, psikis dan seksual. Akibatnya, anak selalu berpotensi

dihadapkan dengan praktek kekerasan. Pelakunnya pun bervariasi menurut usia; mencakup orang tua, saudara kandung, kerabat, masyarakat sekitar dan bahkan guru di sekolah. Prinsip pendidikan yang tidak terinternalisasi dalam diri manusia sebagai peserta didik adalah alasan utama mengapa manusia terjebak dan memilih untuk melakukan kekerasan.

Persoalan fundamental yang dihadapi oleh masyarakat modern di atas, agaknya perlu digeser dengan paradigma keilmuan yang tidak terlalu materialistik. Sekiranya, kegelisahan akademik tersebut akan menjadi sajian dalam tulisan ini. Dengan demikian, persoalan kemanusiaan harus segera disikapi dengan pandangan empirik rasional yang sebelumnya pernah mewarnai sejarah pendidikan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Wajah Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan universal yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha manusia untuk melestarikan dan meningkatkan mutu kualitas hidup yang didapat melalui proses belajar yang panjang, yang dimulai sejak prenatal hingga kematian. Pakar pendidikan seperti Langeveld, Brubacher, N. Driarkoro S.J., Ki Hadjar Dewantara pernah menyebutkan bahwa pendidikan sepanjang hidup/hayat (*life long education*). Tiada kehidupan tanpa kegiatan yang bersifat pendidikan. Bagaimanapun sederhanya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi interaksi sosial yang secara esensial disebut pendidikan (Gunawan, 2000: 107). Tidak heran jika R.S Peters dalam bukunya *Philosophy of Education* menandakan bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak mengenal akhir karena kualitas kehidupan manusia terus meningkat (Murtiningsih, 2004: 3).

Melompat jauh meninggalkan potret peradaban lama, dalam sejarahnya pendidikan di Indonesia juga memberikan nilai historisitas yang jauh berbeda. Sejak Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya pada proklamasi 17 Agustus 1945, selaku bangsa, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan nasib negaranya dengan jalan menyusun dan melaksanakan sistem kehidupan bernegara-kebangsaan. Dengan demikian, setiap Negara kebangsaan membangun

sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem hukum nasional begitu juga dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan sejarah nasionalismenya masing-masing. Berkenaan dengan itu, pembangunan sistem pendidikan di setiap Negara kebangsaan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari nasionalisme Negara-kebangsaan yang bersangkutan dalam melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (Mudyahardjo, 2001:195).

Pendidikan nasional Indonesia merdeka merupakan kelanjutan dari cita-cita dan praktek-praktek kehidupan masa lampau. Apa yang menjadi landasan historis pendidikan nasional Indonesia adalah cita-cita dan praktek-praktek pendidikan masa lampau yang tersurat dan tersirat. Secara garis besar, apabila dilihat dari segi budaya, maka pendidikan masa lampau yang tersurat atau tersirat menjadi dasar penyelenggara pendidikan nasional dapat dibedakan menjadi pendidikan tradisional (penyelenggaraan pendidikan di nusantara yang dipengaruhi oleh agama-agama besar di dunia seperti Hindu-Budha, Islam dan Nasharani), pendidikan kolonial barat (kolonial Belanda) dan pendidikan kolonial jepang (militer jepang dalam zaman perang dunia II).

Merujuk pada sistem pendidikan nasional Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang fungsi pendidikan, bahwasanya fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya meujudkan tujuan nasional. Hal ini mengandung arti bahwa fungsi pendidikan nasional adalah (1) Memerangi segala kekurangan, keterbelakangan dan kebodohan (2) Memantapkan ketahanan nasional (3)Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan kebhinekaan tunggal ika. Karena itu, Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran (UUD 1945 pasal 39). Untuk membuka kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya, baik jalur formal maupun non formal. Sehubungan dengan penyediaan kesempatan pendidikan yang luas, maka dianut asas pendidikan seumur hidup.

2. Tantangan dalam Dunia Pendidikan

Pada mulanya, pendidikan diartikan sebagai proses mendewasakan anak (teori lengeveld), maka pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih

dewasa kepada anak yang belum dewasa. Konsep ini kemudian mempengaruhi banyak kalangan yang menurut sebagian kelompok pandangan ini membentur pada persoalan nilai yang dianut. Pada masyarakat suku Jawa misalnya, dikenal sebuah pepatah yang disebut *ora ono kebo nyusu gudel*, atau tidak pernah ada (induk) kerbau menyusui pada anak kerbau. Jika disinergikan dengan pola pendidikan keluarga, dapat dimaknai bahwa orang tua tidak mungkin berguru kepada anaknya. Sehingga pendidikan hanya dapat diberikan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa.

Menurut Jacques Delors selaku ketua Komisi Internasional tentang pendidikan untuk abad ke-21 dari persekutuan bangsa-bangsa (PBB), dalam laporannya; *Learning: The Treasure Within (1996)*, mengemukakan tujuh macam ketegangan yang akan terjadi serta menjadi ciri dan tantangan abad ke-21 sebagai berikut:

- a. Ketegangan antara global dengan local. Orang secara berangsur-angsur perlu menjadi warga Negara dunia tanpa tercabutnya akar-akar budaya mereka dan karenanya tutur serta berperan aktif sebagai bagian dala kehidupan mereka berbangsa dan bermasyarakat.
- b. Ketegangan antara universal dan individual. Kebudayaan pasti menjadi sifat global. Manusia tidak dapat mengabaikan resiko-resiko dan menuai semua kemanfaatan yang dilahirkan oleh globalisasi. Dengan demikian, manusia harus cerdas menentukan nasib dan pilihan-pilihan hidup terkaitan masa depan.
- c. Ketegangan antara tradisi dan kemoderenan. Ini masih menjadi persoalan yang sama dengan sebelumnya. Tradisi dituntut selektif untuk beradaptasi dengan segala perubahana yang ada. Globalisasi dan kemajuan teknologi adalah serangkaian bentuk kemoderenan yang mesti dihadapi dengan sikap dan mental yang kokoh.
- d. Ketegangan antara pertumbuhan jangka panjang dan jangka pendek. Ketegangan ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Pendapat umum meneriakkan, perlunya jawaban dan pemecahan masalah dengan segera. Padahal dilain itu, banyak masalah yang memerlukan suatu strategi perbaikan keadaan yang harus dilaksanakan dengan sabar, terencana dan musyawarah.

Strategi tersebut akan sangat tepat jika digunakan dalam kasus penyelesaian dan penentuan kebijakan.

- e. Ketegangan antara perlunya kompetisi dengan kesamaan kesempatan. Ini merupakan masalah klasik telah dihadapi oleh para pengambil keputusan pada abad ke-20. Pemecahan masalah kadang telah diusulkan, namun tidak pernah tahan uji dalam waktu. Kompetisi menyebabkan para pengambil keputusan tertekan dan kehilangan misi saat meleakakukan kewenangan dalam meraih keputusan. Seharusnya kompetensi ini memberikan dorongan kekuatan, solidaritas dan semangat persatuan.
- f. Ketegangan antara perluasan pengetahuan yang berlimpah ruah dengan kemampuan manusia untuk mencernanya. Ketegangan ini erat kaitannya antara kebijakan yang dihasilkan di birokrasi dalam hal implementasinya di lembaga pendidikan (kurikulum). Pada prinsipnya, birokrasi tidak dapat mencegah keinginan para praktisi di lembaga pendidikan untuk mengadakan pelajaran baru dari lintas pengetahuan terkait. Karena itu perlu dirumuskan sebuah strategi berkenaan dengan penentuan pilihan yang selalu mengutamakan pada hal-hal pokok suatu pendidikan.
- g. Ketegangan spiritual dan material. Kedua elemen ini tidak jarang bersinggungan satu sama lain yang kemudian bermuara pada norma dan moral. Sejatinya, dunia pendidikan bertugas mendorong setiap manusia agar bertindak sesuai nilai-nilai yang berlaku. Serta memberikan penghargaan penuh terhadap pluralism untuk meningkatkan spirit pendidikan dalam tingkat universal (Delors, 1996:17-18)

Berangkat dari pandangan di atas, ketegangan yang dipengaruhi oleh faktor tradisi-modernisasi dan spiritual-material lebih dekat dengan ranah pendidikan dewasa ini. Baik tradisi maupun modernisasi rupanya lebih kental digawangi oleh arus globalisasi yang kian mendesak perubahan social. Pertarungan dan aturan persaingan global tidak mustahil ditentukan oleh mental dan konsep diri yang kuat. Sehingga bagi mereka yang lemah, akan mudah tersisihkan dan menerima berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan. Inilah konsekuensi logis yang akan muncul apabila pendidikan tidak mampu memberdayakan bangsa untuk bertarung secara obyektif dan terbuka. Sudah

banyak pertanda yang mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia, terutama generasi muda, cenderung terjebak dan tidak siap untuk melangkah jauh ke depan. Tawuran di kalangan pelajar, penggunaan akses internet yang tidak dibatasi, kenakalan remaja hingga praktek kekerasan terhadap anak adalah *output* atas tidak terinternalisasinya pendidikan dengan baik.

Agar pendidikan moral tidak bersifat indoktrinatif, peserta didik perlu didorong untuk menemukan alasan-alasan yang mendasari keputusan moral. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan mengontrol tindakan. Hal ini diperlukan agar seseorang benar-benar memahami keputusan moral yang diambil, dapat mengidentifikasi alasan baik yang harus diterima dan sebaliknya. Alasan yang baik adalah ide yang memberikan kontribusi dalam mengatasi situasi yang bersifat problematik. Cara ini sangat memungkinkan untuk menstimulasi perkembangan kognisi, menumbuhkan kebebasan berfikir serta dapat memadukan proses dan hasil pendidikan secara harmonis.

Dampak dari semua kemajuan masyarakat modern, kini dirasakandemikian fundamental sifatnya. Ini dapat ditemui dari beberapa konsep yang diajukan oleh kalangan agamawan, ahli filsafat dan ilmuwan sosial untuk menjelaskan persoalan yang dialami oleh masyarakat.

3. Kekerasan Terhadap Anak

Kata “anak” dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Menurut sumber ini, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan (Dahlan, 1996: 114).

Definisi yang beragam disebutkan dalam beberapa peraturan dan Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, memberikan batasan umur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Berbeda dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun. Sedangkan menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan seperti perlakuan yang dapat merugikan fisik, mental maupun seksual anak. Sebagian lain beranggapan kekerasan terhadap anak disebut juga dengan *child abuse*. Kekerasan dapat bersifat penelantaran terhadap kesejahteraan anak. Bentuk kekerasan yang paling umum ditemui adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan (*scrapes/scratches*).

Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*) (Suyanto, 2002: 114).

Berbagai literature dalam kajian Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara di hadapan Tuhan. Satu sama lain memiliki keistimewaan dan juga saling melengkapi atas kekurangan masing-masing. Pesan tersebut tersirat dalam lafadh Al Qur'an surat An Nahl (16):97 yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat di atas menerangkan tentang kesamaan potensi yang dapat dimaksimalkan oleh setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Usaha tersebut dapat direalisasikan dengan menolak setiap perlakuan deskriminatif. Memperlakukan anak secara baik, adil dan humanis adalah bagian terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Secara substansial, kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu:

- a. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan
- b. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, membatasi keluarrumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusak benda-benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan konstan
- c. Kekerasan seksual (*sexual abuse*). Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain.
- d. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar,sertamengontrol akses ke perawatan kesehatan dan pekerjaan (Kapoor, 2000: 2).

Beberapa ahli ilmu sosial menyatakan kekerasan dalam konteks agresi dapat disebabkan karena pelaku frustrasi, yaitu tidak stabilnya kepribadian seseorang. Banyaknya adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam film-film dan televisi juga mempengaruhi perilaku agresi.

Buss dan Perry dalam karyanya yang berjudul *The Aggression Questions* (Buss dan Perry, 1992: 36-37) mengemukakan bahwa agresi meliputi empat jenis:

- a. Agresi fisik (*phisic aggression*), yaitu bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang secara fisik. Misalnya memukul, menendang, membunuh dan sebagainya.
- b. Agresi verbal (*verbal aggression*) yaitu bentuk agresi yang dilakukan untuk orang lain secara verbal dengan menggunakan kata-kata. Misalnya mengumpat, memaki, membentak dan sebagainya.
- c. Kemarahan (*anger*) yaitu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain, tetapi efeknya bisa nampak dalam perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya menampakkan sinyal

kemarahan secara fisik, tidak membalas sapaan, mata melotot dan sebagainya.

- d. Permusuhan (*hostility*) yaitu sikap dan perasaan negatif terhadap orang lain yang muncul karena perasaan tertentu misalnya iri, dengki, cemburu, memfitnah dan sebagainya.

Bentuk-bentuk kekerasan di atas mencerminkan pola kekerasan yang dialami anak selaku korban kekerasan. Rekam jejak yang menggambarkan tingginya angka kekerasan menunjukkan bahwa, anak kecil paling berisiko mendapatkan kekerasan fisik, sementara kekerasan seksual secara dominan menimpa mereka yang telah mencapai pubertas atau remaja. Anak laki-laki lebih berisiko mendapatkan kekerasan fisik di banding anak perempuan, sementara anak perempuan lebih berisiko mendapatkan kekerasan seksual, penelantaran, dan pelacuran paksa (*human trafficking*).

Dari sejumlah kasus yang penyusun temukan, kasus kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling tinggi secara statistik. Dalam kurun waktu Januari hingga April 2014 saja Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) mencatat telah terjadi pelecehan seksual sebanyak 85 kasus. Data ini belum termasuk kalkulasi yang korbannya adalah orang dewasa.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh KPAI, terdapat 2.509 laporan pada tahun 2011, 59% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2012, terdapat 2.637 laporan, 62% diantaranya adalah kekerasan seksual. Lebih mencengangkan lagi adalah angka kekerasan seksual meningkat 30% pada tahun 2012-2013. Jadi tidak berlebihan jika KPAI menegaskan bahwa tahun 2014 Indonesia berada pada level darurat kekerasan seksual terhadap anak (Fadhli, 2014).

Dalam berbagai kasus kekerasan yang menimpa anak pada usia remaja, terutama pada kasus kekerasan seksual, anak sering disalahkan. Anak dilekatkan dengan berbagai label negative oleh masyarakat di lingkungan sosialnya. Ironisnya, anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat cenderung melihat bahwa kasus ini terjadi karena korban sebagai pemicu atau pemancingnya.

Asumsi di atas menjadi klise tentang pentingnya upaya perlindungan terhadap anak serta pentingnya upaya merubah cara pikir. Pola pikir yang mengarah pada perlakuan kekerasan akan bermanifestasi menjadi konstruksi sosial yang kemudian mengakar dan selanjutnya dijadikan sebuah aturan (*role*) bagi masyarakat. Dengan demikian, anak akan mempunyai beban ganda untuk memerdekakan dirinya layaknya anak-anak kebanyakan yang jauh dari lika-liku kekerasan.

Sementara itu, bagi anak yang pernah menerima perlakuan kekerasan pada umumnya enggan untuk melaporkan peristiwa yang dialami. Banyak faktor yang melatar belakangi. Beberapa diantaranya adalah anak merasa malu karena menganggap hal ini merupakan aib sehingga orang lain tidak boleh tahu, faktor usia anak membuat anak masih labil untuk bisa menyikapi persoalannya secara rasional, rasa takut akan ancaman pelaku ditambah oleh rasa khawatir karena mendapatkan tekanan, sehingga menyebabkan kasus kekerasan tidak terdeteksi, karena tidak dilaporkan. Jika keadaan ini terus dibiarkan dan tidak disikapi dengan baik niscaya akan menjadi bencana sosial bagi masa depan anak.

Fenomena ini tentu sangat merugikan anak selaku korban, baik secara fisik maupun psikis anak. Bahkan anak kehilangan hak dan kesempatannya untuk hidup layak seperti anak-anak pada umumnya. Sebagaimana prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang tertera dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 2; (a) non-diskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

4. Pendidikan Moral dalam Prinsip Pendidikan Tradisional

Pendidikan yang dibumbui dengan prinsip tradisional tidak jarang diterangi sebagai bentuk pendidikan yang kuno. Dalam arti sempit, pendidikan dalam istilah ini disebut sebagai pendidikan yang dikembangkan dalam sekolah konvensional. Di dalamnya hanya terdapat guru, murid, sistem administrasi, alat bantu atau media pembelajaran yang baku (baca: kurang canggih). Pendidikan tradisional (konsep lama) sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Menurut konsep ini rasioingatanlah yang memegang peranan penting dalam proses belajar di sekolah. Berbeda dengan Konsep pendidikan modern

(konsep baru), yaitu ; pendidikan menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik, pendidikan merupakan proses belajar yang terus menerus, pendidikan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dan pengalaman, baik di dalam maupun di luar situasi sekolah, pendidikan dipersyaratkan oleh kemampuan dan minat peserta didik, juga tepat tidaknya situasi belajar dan efektif tidaknya cara mengajar (Machmud, 1979 : 3).

Menurut Smith (2001: 164-165), ciri-ciri umum dari sekolah tradisional antara lain yaitu:

- a. Anak-anak biasanya dikirim ke sekolah dalam wilayah geografis tertentu
- b. Mereka kemudian dimasukkan yang dibedakan secara kelas dan umur
- c. Adanya sistem kenaikan kelas di setiap tahun
- d. Prinsip sekolah biasanya otoritarian; anak-anak diharapkan menyesuaikan diri dengan tolak ukur dan ketetapan yang sudah ada.
- e. Guru sebagai penentu kebijakan
- f. Kurikulum berpusat pada subjek-subjek akademik
- g. Bahan ajar yang paling umum adalah buku dan teks

Prinsip-prinsip belajar tentang bagaimana cara belajar diterima dan dimengerti, lalu ditanamkan dalam sistem-sistem persekolahan, diturunkan di sekolah-sekolah yang kemudian diimani oleh guru secara perorangan. Inilah yang dinamakan teori elektik yang menyokong pembelajaran pendidikan tradisional. Sementara itu, prinsip-prinsip pengajaran lainnya sebagai berikut:

- a. Motivasi didasari hukuman, ganjaran atau hadiah (*punishment and reward*)
- b. Belajar dengan menghafal dan menyimpan informasi tanpa bantuan catatan ditekankan dalam sistem pendidikan tradisional
- c. Lebih mementingkan aspek psikologi behavioral tinimbang psikologi kognitif
- d. “Kurikulum tersembunyi” memainkan peran kunci dalam kehidupan pelajar
- e. Pada umumnya, dalam proses pengajaran tidak diturunkan oleh teori tertentu
- f. Modus dominan dalam pengajaran adalah guru bicara
- g. Melakukan sistem pengelompokan siswa-siswi

Ketertekanan dalam pendidikan dan ketidak mampuan murid di sekolah sering menjadi penyebab psikologis yang menyebabkan mereka meluapkan ekspresi dirinya secara negative. Karena itu, suasana pembelajaran di kelas,

komunikasi antara guru dan siswa/siswi, juga hubungan timbal balik lainnya menjadi proses penentu bagi terciptanya mental pelajar.

Rasa tertekan biasanya bermula dari ketidaknyamanan siswa/siswi terhadap situasi kelas, yang mana guru merupakan pihak yang paling berpengaruh di dalamnya. Siswa/siswi yang merasa terkekang, merasa tidak tersampaikan aspirasi atau karena beban pelajaran yang tidak diminati akan berimbas pada perlawanan yang dilakukan di luar kelas. Ketertekanan membuat siswa/siswi merasa tidak dihargai. Pada akhirnya mereka mencari sandaran eksistensi diri untuk mendefinisikan keberadaan dirinya sebagai “manusia” yang dimaknai menurut defenisinya sendiri melalui proses pencarian jati diri. Pencarian identitas biasanya dilakukan dengan cara mencari referensi diri dengan cara yang beragam seperti melalui pergaulan, media dan hal lain yang dianggap berpihak. Bahkan tayangan televisi yang luput sensor serta konten pornografi menjadi benih hadirnya kekerasan.

Disorientasi nilai juga menjadi pemicu kebanyakan terjadinya kekerasan, yakni kehilangan arah dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Kondisi yang tidak stabil dan mobilitas yang terlalu berlebihan membuat beban dan fungsi nalar menjadi lebih berat. Indikasinya akan melahirkan pribadi-pribadi yang keluar jalur (*out-reach*) atau berantakan. Jika sudah begini, sejumlah perilaku yang bersifat devian atau menyimpang seperti agresi akan lahir sebagai wujud kekerasan

Pada konteks ini, meningkatnya jumlah pelaku kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh kehilangan konsep diri (*frustasi*) dan lemahnya daya kontrol diri (*self protection*). Keduanya itu merupakan turunan dari moral. Penanaman nilai-nilai atau yang lebih populis dengan sebutan norma-norma tak ayal menjadi suatu keharusan. Tidak hanya yang bersifat duniawi semata, pendidikan agama yang diterapkan dalam keluarga harus menjadi porsi utama (Fadhli, 2013).

Jika disenergikan dalam konteks ke-Indonesiaan, salah satu produk dari bentuk pendidikan tradisional yang pernah diterapkan di nusantara adalah pendidikan pesantren. Pada mulanya, pendidikan pesantren sangat kental dengan corak tradisional-religius. Walau setiap pesantren memiliki metode yang berbeda, namun secara esensial kesemuanya memiliki pondasi dan prinsip yang sama. Muhammad Sya'ban Ayyub dalam kitab *كيف ربالمسلمون ابناءهم* menyebutkan

bahwa Rasulullah sangat menekankan pendidikan anak dengan cara kasih sayang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal (1992: 23) yaitu:

كان رسول الله ارحم الناس با لصبيان

Adapun hadis tentang keutamaan kasih sayang dalam pendidikan (Imam al-Bukhori, 1987: 5371) juga disebutkan sebagai berikut:

ان افضل السبل التربية هؤلاء الصغار لا يكون الا بالرفقة والرحمة

Pendidikan secara egaliter dengan mengedepankan sikap lemah-lembut juga dicontohkan oleh Rasulullah. Jika berpijak pada kultur masyarakat arab saat itu, hal ini tentu saja sangat dikotomis dengan kebudayaan Jahiliyah yang sangat deskriminatif terhadap anak, terutama terhadap anak perempuan. Bagi Rasulullah, anak laki-laki dikasihi, tidak sekedar anak bawang atau pelengkap prajurit perang. Sama halnya dengan anak perempuan, dimuliakan fitrahnya. Kelahirannya pun tidak lagi menjadi sebab yang menghitamkan muka masyarakat jahiliyah (malu) karena dipandang sebagai aib dan beban social (Ayyub, 2011:18).

Keberadaan cara pandang di atas dalam system pendidikan islam, menopang misi signifikan terkait tujuan menghadirkan pola pendidikan yang lebih humanis. Meskipun telah terjadi pembaharuan dan modernisasi di lembaga pesantren dewasa ini, Secara esensial, sisa endapan dari nilai-nilai tradisonalisme tersebut secara nyata masih terlihat. Bisa dipotret dari dinamika yang dibangun pendidikan pesantren (adab) antara hubungan murid (kyai) dan guru (santri).

Saat ini, sebagian pesantren sudah mulai beranjak pada pengembangan pendidikan yang canggih, berisi peralatan lengkap, dikomandani para guru berkualitas akademis bagus dan cerdas serta dengan fasilitas yang sangat maju. Lembaga ini mencoba mendandani dirinya dengan suntikan kemajuan yang berbau kemoderenan tanpa harus mengikuti arus. Berusaha menawarkan suatu proses pelatihan dan pendidikan yang membuat kecerdasan anak melejit dan tingkat kecerdasannya akan lebih tinggi dari pada sekolah-sekolah biasa. Ini adalah ekspresi yang wajar dari bentuk dialektika yang dialami lembaga pendidikan. Secara fisik pesantren menunjukkan ragampendidikan yang syarat dengan kemajuan, namun secara implicit ditantang untuk berhadapan dengan era

yang serba modern dan dianggap dapat merusak moral kemanusiaan dari sudut pemahaman agama.

Karena itu, dalam pendidikan tradisional terdapat banyak isu yang perlu didiskusikan agar dipahami bersama. Isu agama, moral dan nilai-nilai menjadi bagian yang paling dominan. Agama dan moral sudah menjadi *icon* bagi terwujudnya sistem pendidikan tradisional. Keduanya berjalan berdampingan. Dibalik itu, kesalahan sering muncul menyelimuti pemaknaan pendidikan moral yang dimaksud dalam pendidikan tradisional.

Ahmad Wahib, melalui pemikirannya dibukukan dalam judul *Pergolakan Pemikiran Islam* menulis, "...Moral adalah norma atau cita-cita dan bukan alat penyelesaian. Dia lebih banyak sebagai produk" (Wahib, 2002). Artinya, pendidikan moral yang dimaksud bukan sebagai alat ketika terjadinya distabilitas social atau kekacauan dalam dunia pendidikan. Moral (moralitas) juga bukanlah nilai-nilai yang diperoleh dari lingkungan social (Suyanto, 2009: 11). Melainkan bahwa moral dilihat sebagai tujuan hidup setelah adanya penerapan alamiah atas nilai-nilai (norma) yang ditanamkan kemudian diperbuat secara sadar dan rasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan moral merupakan suatu proses ajar yang hanya didapatkan melalui proses belajar. Di dalamnya terdapat unsur pertimbangan dan konsekuensi atas sebuah keputusan. Melalui proses ajar yang diterapkan melalui prinsip pendidikan tradisional, setiap individu akan diberdayakan secara moral dan pengetahuan dalam pengambilan-pengambilan sikap dan keputusan yang humanis.

C. KESIMPULAN

Dunia pendidikan tidak dapat dengan sendirinya melakukan pemecahan masalah yang timbul akibat persinggungan hubungan-hubungan sosial. Pemecahannya tentu harus dilakukan dengan sabar serta perencanaan yang terintegrasi. Kendati demikian, pendidikan merupakan pintu utama atas keberlangsungan dan keberaturan budaya. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pola pikir yang baik. Hal ini dikarenakan bahwa pendidikan menjadi komponen dasar dari kohesi/identitas social atau kepribadian nasional.

Karena itu, pendidikan idealnya disebut sebagai proses memanusiakan manusia secara manusiawi. Proses tersebut tentu harus diiringi dengan situasi dan kondisi yang relevan dengan perkembangan zaman. Sekiranya, pendidikan yang kurang manusiawi seperti pendidikan yang menerapkan bentakan, pukulan bahkan terkadang makian, kurang atau tidak dapat diterima oleh masyarakat dewasa ini. Pendidikan yang mengarah pada pelucutan kontak fisik hanya akan menghasilkan manusia pasif, agresif, tertekan dan sebagainya.

Hal ini memberi petunjuk bahwa pendidikan haruslah bersifat universal yang mengandung fungsi adaptif dan inovatif dari setiap individu dan masyarakat. Salah satunya dengan keberadaan fungsi pendidikan tradisional yang menghendaki keterkaitan antara dimensi kognitif dan dimensi holistic yang bermuara pada pendidikan moral. Pendidikan moral menyatu dalam proses dan isi pembelajaran. Kebenaran, kejujuran tanggung jawab adalah inti penyelenggaraan sebuah pendidikan. Dengan keberadaan masyarakat, peranannya akan semakin terbantu, dimulai ketika anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, kemudian terus berlanjut pada fungsi edukatif secara komprehensif. Tujuannya tentu untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Serta merealisasikan kehidupan yang jauh dari materi-materi kekerasan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al- Bukhori, Imam. 1987. *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*. Dar Ibnu Katsir. Beirut.
- Berkowitz, Leonard. 2006. *Emotional Behavior. Mengenal Prilaku Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekitar Kita dan Cara Penanggulangannya*. terj. Hartatni Woro Sustiati. CV Teruna Gravica. Jakarta.
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Darmiyati, Zuchdi. 2008. *Humanisasi Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Delor, Jacques. dkk.. 1996. *Learning. The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the twenty first century*. Unesco Publishing. Paris.
- Erich Fromm. *The Revolution of Hope . Toward a Humanized Technology*. New York . Harper & Raw. 1968. p. 5..dalam Syafi'i Ma'arif. Pengembangan

Pendidikan Tinggi Post Graduate Studi Islam Melalui Paradigma Baru Yang Lebih Efektif. 1997.

Fadhli, Ashabul. 2013. *Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak*. Harian Padang Ekspres. 6 Mei 2013

Fakih, Mansour. 1999. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Gunawan. Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Hambal, Ahmad bin. 1992. *Kitab al-Zuhdi*. Dar al-Fikr. Beirut.

Lickona, Thomas. 1991. *Educational for Character*. Bantam Books. New York.

Machmud, M. Dimiyati. 1990. *Psikologi Pendidikan*. BPFE. Yogyakarta.

Mudyahardjo, Redja. 2001. *Pengantar pendidikan. sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indoenesia*. Rajawali Press. Jakarta.

Murtiningsih, Siti. 2004. *Pendidikan Alat Perlawanan. Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire..* Resist Book. Yogyakarta.

Russel, Bertrand. 1993. *Pendidikan dan Tatanan Sosial*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Smith, Vernon. 2001. *Pendidikan Tradisional*. dalam Omi Intan Naomi. *Menggugat Pendidikan. Fundamentalis. Konservatif. Liberal dan Anarkis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suyomukti, Nurani. 2010. *Teori-Teori Pendidikan*. Ar Ruzz Media. Yogyakarta.

Sya'ban Ayub, Muhammad. 2011. *Kaifa rabba al-Muslimuna abna ahum*. Muassasah Iqra'. Kairo.

Syafi'i Ma'arif, Ahmad. 1991. *Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia. Dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*. ed. Muslih Usa. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Wahid, Ahmad. 2002. *Pergolakan Pemikiran Islam*. LP3ES. Jakarta.